KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDAKIAN GUNUNG
DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

SOP



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
Jl. Basuki Rahmat No.11 Kotak Pos 40 Sungai Penuh 37101 Jambi
TLP. 0748 22250 Fax 22300

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

NOMOR 54 TAHUN 2026

T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN GUNUNG
DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada pengunjung serta pengelolaan ekowisata yang profesional, efektif dan efisien pada pendakian Gunung di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan data dan informasi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral salah satu gunung berapi aktif di Indonesia adalah Gunung Kerinci;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung Kerinci, Gunung Tujuh dan Gunung Masurai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di KSA, KPA, Taman Buru dan Hutan Alam;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Pembagian Kelas Tiket Masuk Pengunjung Wisata Alam di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam Untuk Pengenaan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
13. Peraturan Ditjen PHKA Nomor P.7/IV-Set/2011 tentang Tata cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
14. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: 147 Tahun 2025 tentang Grading Jalur Pendakian Gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dan Modul SOP Pengelolaan Pendakian Gunung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.
15. Surat Edaran Direktorat Jenderal KSDAE Nomor: SE.2/KSDAE/PJLKK/KSA.3/4/2022 Tentang Etika Berwisata di Kawasan konservasi;
16. Memorandum Direktorat Jenderal KSDAE Nomor M.73/KSDAE/PJLKK/KSA.3/11/2024 Tentang Penerapan *Cashless Payment* di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN GUNUNG DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

KESATU : Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung di Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU merupakan acuan dalam Pendakian Gunung di Wilayah Kerja Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Nomor: SK.82/T.1/BIDTEK/KSA.5/2/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblat, SK.83/T.1/BIDTEK/KSA.5/2/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung Tujuh di Taman Nasional Kerinci Seblat dan SK.84/T.1/BIDTEK/KSA.5/2/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pendakian Gunung Masurai di Taman Nasional Kerinci Seblat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR,

HAIDIR, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730729 199803 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Jambi di Jambi;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Bupati Kerinci di Kerinci;
5. Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
6. Bupati Merangin di Bangko;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta;
8. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
9. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Ditjen KSDAE di Jakarta;
10. Direktur Perencanaan Konservasi Ditjen KSDAE di Jakarta;
11. Direktur Pengelolaan Konservasi Ditjen KSDAE di Jakarta;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi;
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi di Jambi;
15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang;
16. Kepala Kepolisian Resor Kerinci di Sungai Penuh
17. Komandan Distrik Militer 0417/Kerinci di Kerinci;
18. Komandan Distrik Militer 0309/ Solok di Solok;
19. Komandan Distrik Militer 0420/ Sarko di Sarolangun;
20. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci di Kerinci;
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
22. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin di Bangko;
23. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Sungai Penuh di Sungai Penuh;
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
25. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
26. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Jambi di Jambi;
27. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci di Kerinci;
29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin di Bangko

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
Nomor : 54 Tahun 2026
Tanggal : 17 Juli 2026
Tentang : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAKIAN GUNUNG DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT**

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka untuk melakukan pelayanan prima kepada pengunjung dan untuk mewujudkan pengelolaan ekowisata yang profesional, efektif dan efisien dalam hal pengelolaan ekowisata Pendakian lingkup Taman Nasional Kerinci Seblat yaitu Gunung Kerinci, Gunung Tujuh dan Gunung Masurai maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (yang selanjutnya disingkat SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pengelolaannya.

SOP juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP berisi Prosedur Kerja yaitu urutan-urutan yang telah dibuat dalam melakukan suatu pekerjaan dimana terdapat tahapan demi tahapan yang harus dilalui sehingga terlihat jelas adanya aturan yang harus ditaati oleh orang yang akan menjalankan prosedur kerja pada bidang tugas yang telah mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami.

Untuk mewujudkan pendakian *zero waste dan zero accident* khususnya pada Wisata Pendakian Gunung di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) diperlukan regulasi dan langkah kerja yang optimal dan tepat sasaran di setiap aspeknya, baik dari pengelola, pendaki dan semua yang terlibat di dalam aktifitas pendakian itu sendiri. Dengan adanya standar operasional prosedur ini kedepannya bisa dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kerja yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan SOP pendakian Gunung di TNKS ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan demi keselamatan, kenyamanan dan ketertiban pendaki serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem Gunung.

2. Tujuan

SOP Pendakian Gunung di TNKS ini disusun sebagai pedoman atau aturan pelaksanaan/penyelenggaraan pendakian Gunung.

C. Ruang Lingkup

SOP ini disusun untuk pendakian Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh dan Gunung Masurai yang meliputi ketentuan umum, komponen SOP dan ketentuan pendakian.

8. Kemah adalah meletakkan, membangun tenda atau struktur berbentuk tenda dipergunakan untuk berteduh atau menginap.
9. Lari lintas alam/ *Trail Run* adalah kegiatan lari lintas alam yang dilaksanakan pada lintasan alami di kawasan perbukitan, pegunungan, hutan dan medan sejenis dengan dengan mengutamakan daya tahan fisik, teknik dan keselematan.
10. Pintu masuk pendakian adalah pintu resmi yang telah ditetapkan oleh Balai Besar TNKS
11. Pos adalah bangunan fasilitas untuk melakukan pengecekan ulang bagi para pendaki
12. Pendaki adalah pengunjung yang melakukan pendakian di jalur resmi dan telah memenuhi persyaratan pendakian dan memiliki tiket masuk kawasan TNKS.
13. Pendaki nusantara adalah pengunjung berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang melakukan pendakian. Identitas kewarganegaraan dibuktikan dengan menunjukkan KTP/KK.
14. Pendaki mancanegara adalah pengunjung berkewarganegaraan Asing (WNA) yang melakukan pendakian Gunung di Kawasan TNKS, identitas kewarganegaraan dibuktikan dengan status kewarganegaraan di dokumen kependudukan.
15. Petugas Pemungut adalah aparatur sipil negara Balai Besar TNKS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNKS yang mempunyai tugas memungut tiket masuk Kawasan TNKS.
16. *Volunteer*/Relawan adalah sukarelawan bersifat independen yang diperoleh Balai Besar TNKS guna menumbuh kembangkan kegiatan konservasi berupa kesadartahuan, perlindungan dan pelestarian alam di kawasan TNKS.
17. Interpreter adalah orang yang menyampaikan informasi alam/ lingkungan/ hutan kepada pendaki sehingga menjadi jembatan antara keduanya yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepedulian, pemahaman dan penyadaran terhadap pentingnya alam lingkungan/ hutan tersebut.

18. Pemandu adalah orang yang memiliki kemampuan kepemanduan gunung dan memiliki sertifikat dari asosiasi atau organisasi yang diakui, dan terdaftar di Balai Besar TNKS.
19. Porter adalah orang yang menyertai pendaki untuk membantu membawa kebutuhan perlengkapan dan perbekalan selama aktivitas pendakian atau sesuai kebutuhannya sampai kembali ke tempat semula dan terdata di Balai Besar TNKS
20. Penutupan Pendakian adalah kebijakan menutup semua bentuk aktivitas pendakian ke Gunung yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNKS.
21. Pembatasan pendakian adalah kebijakan pembatasan bagi pendaki yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar TNKS berdasarkan laporan aktivitas gunung api.
22. Pemulihan/ *Recovery* ekosistem adalah upaya perbaikan ekosistem dari kondisi rusak ke kondisi awal/ baik secara alami maupun dengan campur tangan manusia.
23. Kuota pendaki adalah jumlah pendaki maksimal harian yang diizinkan untuk melakukan pendakian di setiap pintu masuk resmi yang telah ditetapkan oleh Balai Besar TNKS.
24. Vandalisme adalah salah satu tindakan perusakan fasilitas wisata alam, mencoret-coret/ melukai pohon, batu, dan lain -lain.
25. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
26. *Trekking Organizer* (TO) adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa penyedia jasa perjalanan wisata pendakian.
27. Penyedia Jasa Pramuwisata adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa penyedia jasa pramuwisata.

28. Penyedia Jasa Makanan dan Minuman adalah orang/badan usaha/koperasi yang memiliki Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berupa jasa penyediaan makanan dan minuman.
29. Surat Keterangan Sehat adalah surat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah, Puskesmas, Klinik Kesehatan ataupun Rumah Sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat dan layak untuk melakukan pendakian. Surat keterangan sehat diperoleh paling lama 2 hari sebelum memulai pendakian.
30. Data *checklist* sampah adalah daftar barang bawaan pendaki yang berpotensi menghasilkan sampah.
31. Data *checklist* perlengkapan standar pendakian adalah daftar perlengkapan standar pendakian yang **wajib** dibawa oleh pendaki.
32. Asuransi kecelakaan diri adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan, perlindungan ini mencakup berbagai resiko, mulai dari kematian akibat kecelakaan, cacat tetap, hingga biaya medis yang timbul akibat kecelakaan.
33. Surat pernyataan adalah surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pendaki/ ketua rombongan yang isinya menyatakan bahwa pendaki bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas bahaya/ bencana yang terjadi saat melakukan pendakian.
34. *Cashless payment*/ pembayaran elektronik merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui QRIS dan transfer bank.
35. Sistem *e-ticketing* adalah pendaftaran dan pembayaran tiket masuk untuk kegiatan pendakian Gunung oleh para calon pendaki secara online melalui website atau aplikasi AyoKeTamanNasional.

BAB III. KOMPONEN SOP JALUR PENDAKIAN

A. Jalur dan Pintu Masuk Pendakian di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat

1. Pendakian Gunung Kerinci melalui R10 Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Jambi

   Pos : Pusat Informasi R10 Kersik Tuo

   Kelas : III (Tiga)

   Grade : III (Tiga)

   Kuota : 348 orang / trip

2. Pendakian Gunung Kerinci melalui *Camping Ground* Bukit Bontak Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

   Pos : *Visitor Center* Bukit Bontak/ Kantor SPTN IV di Lubuk Gadang

   Kelas : II (Dua)

   Grade : IV (Empat)

   Kuota : 184 orang / trip

3. Pendakian Gunung Tujuh, ditempuh melalui Desa Sungai Jernih

   Pos : Pusat Informasi Gunung Tujuh di Desa Sungai Jernih

   Kelas : III (Tiga)

   Grade : III (Tiga)

   Kuota : Belum dilakukan kajian DDDT

4. Pendakian Gunung Masurai ditempuh melalui Desa Sungai Lalang

   Pos : Pos Resort Gunung Masurai di Desa Sungai Lalang

   Kelas : III (Tiga)

   Grade : III (Tiga)

   Kuota : Belum dilakukan kajian DDDT

Catatan: Kuota pendakian berdasarkan kajian DDDT dan dapat disesuaikan dengan rekomendasi dokumen kajian DDDT yang sudah disahkan

Tabel 1. Komponen Grade Jalur Pendakian

No	Komponen	Grade III	Grade IV
1	*E-ticketing* dan *cashless payment*	√√	√√
2	Persyaratan dokumen (identitas, surat sehat dll)	√√	√√
3	Penggunaan *trekking organizer* bersertifikat	√√	√√
4	Penggunaan pemandu dan porter (WNI)	√	√√
5	Penggunaan pemandu dan porter (WNA)	√√	√√
6	Persyaratan calon pendaki memiliki pengalaman mendaki gunung grade di bawahnya	√	√√
7	Kebijakan *zero waste* dan *carry in & carry out*	√√	√√
8	Sertifikasi TO, pemandu, porter	√√	√√
9	Helipad dan evakuasi udara tersedia		√
10	Sertifikasi pemandu gunung (BNSP)	√√	√√
11	Shelter darurat, rambu keselamatan dan perlengkapan P3K	√√	√√
12	*Safety briefing*	√√	√√
13	Surat keterangan sehat	√√	√√
14	Rambu reflektif dan sistem pemantauan	√√	√√
15	Audit jalur (3 tahun sekali)	√√	√√
16	Ketersediaan alat SAR	√√	√√

17	Ketersediaan petugas yang memiliki kompetensi *mountain rescue*	√√	√√
18	Pengolahan sampah pendaki	√√	√√
19	Rencana kontigensi darurat	√√	√√
20	Pengaturan rasio pemandu-pendaki	√√	√√
21	Peningkatan kapasitas *mountain rescue* dan pemandu	√√	√√
22	Asuransi	√√	√√

Keterangan:

√ : Opsional

√√ : Wajib tersedia

B. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
   a. Menetapkan dan mengawasi kuota pendakian, menjamin akurasi data pendaftaran dan kehadiran pendaki melalui sistem pemeriksaan *in* dan *out* pos masuk;
   b. Menetapkan, mengatur dan memantau area perkemahan resmi, memastikan seluruh area perkemahan berada pada zona aman;
   c. Melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap jalur pendakian, memastikan jalur pendakian dalam kondisi aman dan layak digunakan;
   d. Mengelola sistem pendakian gunung berbasis *zero waste*;
   e. Menerapkan sanksi denda dan *blacklist* terhadap pelanggaran yang terjadi;
   f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan sertifikasi;
   g. Memastikan semua pendaki mengikuti *safety briefing;*
   h. Mengelola sistem SAR dan menyiapkan posko darurat, memastikan respon darurat dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam, menjamin seluruh peralatan SAR

berfungsi dengan baik serta memastikan terdapat petugas yang memiliki kompetensi sebagai *mountain rescue.*

i. Menyusun, mengawasi dan menegakkan kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan Permenaker No. 5 tahun 2018;
j. Menyediakan sarana dasar pendakian gunung pada pintu masuk, pintu keluar serta sepanjang jalur pendakian;
k. Menetapkan penutupan jalur pendakian pada periode tertentu dengan tujuan untuk pemulihan ekosistem terhadap kondisi biofisik yang terganggu di sepanjang jalur pendakian.

2. Operator Wisata (*Trekking organizer)*

a. Wajib terdaftar, memiliki izin PB-PJWA, serta memiliki sertifikat operator wisata resmi;
b. Memfasilitasi pendaftaran pendaki dan memastikan kepatuhan terhadap kuota dan peraturan yang ditentukan pengelola;
c. Memastikan pendaki yang dilayani hanya berkemah di area resmi dan sesuai dengan yang ditentukan;
d. Mendukung BBTNKS dalam pemeliharaan jalur melalui pemantauan dan pelaporan;
e. Memastian kepatuhan pendaki mengenai terhadap kebijakan *zero waste;*
f. Mendukung penyelenggaraan pelatihan bagi pemandu/ porter melalui koordinasi dengan BBTNKS;
g. Mendukung pelaksanaan edukasi pendaki dan pelatihan pemandu/porter;
h. Mendukung kesiapsiagaan dan kelancaran SAR;
i. Menyediakan layanan pendakian yang memenuhi standar K3 dan memastikan pemandu/ porter terlatih;
j. Memastikan pemanfaatan sarana secara bertanggung jawab serta membantu pengamanan dan pemeliharaan sarana pokok pada jalur pendakian;

k. Mematuhi dan mensukseskan penutupan jalur dalam rangka pemulihan ekosistem/ biofisik yang mengalami kerusakan serta membantu mensosialisasikan kepada calon pendaki.

2. Pemandu
   a. Wajib terdaftar, memiliki izin PB-PJWA, serta memiliki sertifikat pemandu resmi;
   b. Memastikan kelompok tidak melebihi kuota yang ditentukan dan tetap mematuhi jadwal pendakian;
   c. Mengarahkan dan memastikan pendaki ke area perkemahan resmi, memastikan tidak ada aktivitas api unggun, dan rencana perkemahan sesuai dengan laporan yang diajukan;
   d. Memimpin dan mengarahkan pendaki melalui jalur resmi dan melaporkan kondisi jalur di lapangan;
   e. Menjamin bahwa seluruh sampah rombongan dibawa keluar dari kawasan;
   f. Mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi secara berkala;
   g. Menyampaikan edukasi di lapangan kepada pendaki dan melaporkan pelanggaran etika atau SOP kepada operator wisata;
   h. Melakukan penanganan kedaruratan di lapangan secara langsung.
   i. Memastikan pendaki mengetahui keberadaan sarana dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
   j. Mentaati aturan penutupan jalur.

4. Porter
   a. Mendukung logistik dan peralatan perkemahan dengan standar yang sesuai.
   b. Memberikan dukungan kelestarian jalur pendakian.
   c. Mendukung proses pengangkutan sampah pendaki.

d. Memastikan memiliki kemampuan untuk membawa logistik dan melayani tamu dengan baik.
e. Memastikan sampah pendaki dibawa kembali ke luar kawasan.

3. Pendaki
   a. Mematuhi SOP (kuota, jadwal, dan ketentuan pendakian) serta mengikuti *safety briefing.*
   b. Mematuhi seluruh ketentuan perkemahan dan menerapkan prinsip *zero waste.*
   c. Mematuhi jalur resmi dan turut menjaga kelestarian jalur.
   d. Melaporkan keadaan darurat dan mematuhi seluruh prosedur SAR yang berlaku.

IV. KETENTUAN PENDAKIAN

A. Ketentuan Umum

1. Pembelian tiket dan asuransi dilakukan secara online melalui website https://ayoketamannasional.kehutanan.go.id dan Aplikasi AyoKeTamanNasional yang dapat di download melalui Playstore di Android, atau *on the spot/* langsung di masing- masing pintu masuk pendakian dibantu oleh petugas registrasi.
2. Pembelian tiket *on the spot* di masing- masing pintu masuk pendakian dapat dilakukan oleh petugas pintu masuk, dengan menyampaikan TN Identitas yang sudah didaftarkan oleh masing-masing pendaki sebelumnya.
3. Melakukan Pengecekan tiket/ *check in* secara langsung di masing-masing pos/ pintu masuk pendakian Gunung Kerinci via R10 Kersik Tuo Kerinci, Gunung Kerinci via *Camping Ground* Bukit Bontak Solok Selatan, Danau Gunung Tujuh, dan Gunung Masurai, dengan melengkapi surat keterangan sehat, KTP dan surat izin orangtua/ wali bermaterai, dan surat pernyataan.
4. *Safety Briefing* kepada pendaki wajib diberikan oleh petugas, guide ataupun TO sebelum melakukan pendakian.
5. Dalam menerapkan prinsip *zero waste* (nol sampah) kepada setiap pengunjung akan dilakukan pemeriksaan logistik pada saat melakukan *check in* dan pendataan sampah saat *check out* secara ketat, (formulir pemeriksaan sampah terlampir), yang dilakukan oleh petugas di masing- masing pintu masuk.
6. Pendaki **wajib** mentaati waktu pendakian sesuai dengan yang telah diregistrasikan/ booking melalui aplikasi AyoKeTamanNasional, apabila tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan **SANKSI.**
7. Apabila pendaki melanggar kelebihan hari dalam mendaki akan dikenakan SANKSI, kecuali dalam keadaan darurat dan telah dilaporkan kepada petugas;
8. Dalam rangka mitigasi keselamatan pendaki disampalkan hal - hal sebagai berikut:

a. Untuk jalur pendakian Grade IV diwajibkan menggunakan jasa pemandu/ porter, dan untuk pendakian Grade III direkomendasikan menggunakan jasa pemandu/ porter.
b. Untuk WNA diwajibkan menggunakan jasa pemandu/ porter di semua Grade pendakian.
c. Wajib menggunakan jasa Pemandu/ Porter yang telah yang telah terdaftar di TNKS dan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PB_PJWA) di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
d. Pendakian Grade IV diwajibkan memiliki pengalaman mendaki gunung grade di bawahnya dibuktikan dengan sertifikat, foto dan bukti lainnya kepada petugas.

9. Calon pendaki yang berumur kurang dari 17 tahun, wajib menyerahkan Surat Izin Orang Tua/ Wali dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 serta dilampirkan fotocopy KTP Orang Tua/ Wali yang masih berlaku;
10. Untuk komposisi jumlah pengunjung, pemandu dan porter yaitu;
    a. Maksimal pemanduan: 1 orang pemandu untuk 5 orang pengunjung/pendaki;
    b. Maksimal beban porter: 1 orang porter seberat 17,5 kg, dengan rincian 15 kg beban pengunjung, 2,5 kg untuk barang pribadi porter.
11. Mematuhi pembatasan / radius aman pendakian sesuai dengan rekomendasi dari laporan aktivitas yang diterbitkan oleh Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM);
12. Membuat surat pernyataan pendakian untuk Gunung Kerinci (format terlampir).
13. Pendakian 1 hari/ *one day trip* diperbolehkan dengan mematuhi peraturan yang berlaku.
14. Melakukan *Checkout* di masing - masing pintu masuk pendakian sebagai data bahwa pendaki sudah selesai melakukan pendakian, dan mengambil kembali identitas diri yang ditinggalkan.

B. Pendaki DIWAJIBKAN:

1. Berbadan sehat pada saat melakukan pendakian dengan menunjukan Surat Keterangan Dokter (asli) pada pintu masuk dan pada saat melakukan registrasi;
2. Mengikuti *safety briefing* sebelum melakukan pendakan;
3. Masuk jalur pendakian dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Gunung Kerinci untuk *one day trip/ trail run* antara pukul 05.30 - 09.00 WIB, melakukan registrasi, dan mengkonfirmasi ke petugas pintu masuk untuk *check in* sebelum keberangkatan;
   b. Gunung Kerinci untuk berkemah antara pukul 07.30 - 16.00 WIB;
   c. Gunung Tujuh untuk *one day trip/ trail run* antara pukul 07.30 - 11.00 WIB;
   d. Gunung Masurai untuk berkemah antara 07.30 - 12.00 WIB;
   e. Gunung Masurai untuk one day trip/ trail run antara 6.00-08.00 WIB.
4. Melewati jalur pendakian yang sudah ditetapkan dan mematuhi semua rambu-rambu, informasi keselamatan yang ada di sepanjang jalur pendakian;
5. Melakukan evakuasi mandiri terhadap diri dan rekannya yang sakit sebelum mendapatkan bantuan dari petugas;
6. Memakai dan membawa perlengkapan standar pendakian gunung serta perbekalan pendakian yang cukup;
7. Mengisi form administrasi dan isian barang bawaan yang menghasilkan sampah;
8. Membawa *trash bag* / kantong sampah dan membawa sampah bawaannya ke luar kawasan Taman Nasional;
9. Memprioritaskan penanganan bagi wanita yang sedang menstruasi utamanya segera membawa turun korban tersebut apabila sudah menderita sakit;
10. Membawa kelengkapan P3K standar, dan *survival kit* standar;
11. Menjaga norma agama, norma susila dan kearifan lokal;

12. Mengikuti jalur pendakian yang sudah ditetapkan Balai Besar TNKS;
13. Melaporkan kembali ke Pos Pintu Masuk ketika sudah selesai melakukan pendakian.

Petugas Balai Besar TNKS akan memeriksa barang bawaan dan tiket sebelum dan sesudah memasuki kawasan. Dalam rangka penanggulangan sampah oleh para pendaki diwajibkan untuk meninggalkan salah satu identitas asli pribadi kepada petugas akan dikembalikan kepada pendaki apabila barang bawaan yang menghasilkan sampah dibawa kembali keluar TNKS, apabila kartu identitas tidak diambil kembali pendaki dianggap tidak membawa kembali sampah turun dan dikenakan **SANKSI.**

C. Setiap Pendaki DILARANG:

1. Membawa satwa dan tumbuhan serta bagian-bagiannya dari luar dan dari dalam kawasan TNKS;
2. Mengambil, merusak, semua jenis tanaman dan bagian-bagiannya di dalam kawasan TNKS;
3. Membunuh, melukai, mengambil satwa beserta bagian-bagiannya dari dalam kawasan TNKS;
4. Memetik, memindahkan, memotong, menebang, mencabut tumbuhan di dalam kawasan TNKS;
5. Membawa senjata api, senjata tajam (parang, golok dan sejenisnya) kecuali pisau lipat, pisau saku/pisau kecil;
6. Melakukan aktivitas yang menyebabkan kebakaran hutan di dalam kawasan TNKS;
7. Membuang sampah di dalam kawasan TNKS;
8. Mengganggu, memindahkan dan merusak fasilitas yang tersedia di dalam kawasan TNKS;
9. Melakukan vandalisme di dalam kawasan TNKS;
10. Melakukan aktivitas lain selain pendakian tanpa pihak BBTNKS.
11. Mengganti identitas/ pendaki pada form data/ tiket yang dilakukan booking/pembelian.

12. Buang air besar di aliran sungai/mata air dan di sepanjang jalur pendakian;
13. Membawa dan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang (**NARKOBA**), miras dan bahan-bahan yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia di dalam kawasan TNKS dan sekitarnya.

D. Ketentuan Pendakian 1 hari/ One Day Trip untuk *Trail Run*/ Lari Lintas Alam Gunung Kerinci via R10 Kersik Tuo Kayu Aro

1. Mematuhi ketentuan pendakian secara umum;
2. Mempunyai lisensi/ rekomendasi dari ALTI (Asosiasi Lari Trail Indonesia);
3. Wajib didampingi oleh Guide yang berlisensi/ berkompeten untuk aktivitas *trail run* / lari lintas alam.

E. Ketentuan Paralayang dari Gunung Kerinci

Akan diatur di SOP paralayang tersendiri.

F. Ketentuan Penerbangan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)/ Drone

1. Mematuhi aturan pendakian secara umum
2. Mengisi form pendaftaran/pemberitahuan penggunaan PUTA/Drone pada website TNKS https://tnkerinciseblat.ksdae.kehutanan.go.id/.
3. Memastikan drone layak terbang dan sesuai ketentuan regulasi penerbangan di Indonesia (jenis, berat, ketinggian maksimal dll).
4. Tidak melakukan penerbangan mendekati satwa, sarang satwa dan mengganggu aktivitas satwa lainnya.
5. Melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Penutupan Sementara Jalur Pendakian

1. Dalam rangka perbaikan kondisi biofisik/ rehabilitasi jalur pendakian, jalur pendakian akan ditutup untuk aktivitas pendakian pada waktu sebagai berikut:

a. Minggu ke 1 (satu) dan 2 (dua) September untuk Jalur Pendakian Gunung Kerinci via R10 Kersik Tuo dan *Camping Ground* Bukit Bontak Solok Selatan.
b. Minggu ke 3 (tiga) dan 4 (empat) September untuk Jalur Pendakian Gunung Tujuh
c. Minggu ke 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk Jalur Pendakian Gunung Masurai

2. Penutupan pendakian dapat dilakukan sewaktu- waktu dengan memperhatikan tingkat aktivitas vulkanik dan bahaya gunung yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)

B. SANKSI DAN DENDA ADMINISTRASI

Sanksi dan pelanggaran yang dilakukan selama pendakian dikategorikan menjadi 3 skala tingkatan, yaitu ringan, sedang dan berat dengan rincian sebagai berikut:

1. Klasifikasi pelanggaran ringan

Umumnya bersifat administratif atau teknis dan tidak menimbulkan risiko langsung terhadap kawasan konservasi serta tidak mengancam keselamatan jiwa baik pendaki, pemandu maupun orang di sekitar, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi pelanggaran ringan

No	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Pendakian melebihi waktu izin (*overstay*)	Turun lewat waktu dari yang telah ditentukan	Teguran lisan dan tertulis, denda sesuai peraturan Menteri Kehutanan No 12 tahun 2025
2	Mendirikan bukan di area *campsite*	Mendirikan tenda di luar area *campsite* yang sudah ditentukan	Teguran langsung, tertulis, pencatatan dalam sistem, dan diarahkan untuk pindah lokasi

3	Tidak membawa perlengkapan standar	Tidak sesuai ketentuan logistik dan *safety*	Edukasi langsung, tidak dilanjutkan sebelum melengkapi perlengkapan
4	Buang sampah (puntung rokok, bungkus permen dan makanan)	Pelanggaran ringan terhadap prinsip *zero waste*	Teguran langsung, tertulis, dicatat di sistem dan wajib bersih-bersih tambahan
5	Tidak memenuhi arahan	Mengabaikan instruksi non kritis (tidak terkait langsung dengan situasi darurat)	Teguran langsung, tertulis dicatat di sistem
6	Membawa peralatan musik dan menggunakannya	Mengganggu kenyamanan pendaki lain	Teguran langsung, tercatat di sistem

2. Pelanggaran sedang

Pelanggaran yang berpotensi mengganggu dan atau merusak kelestarian lingkungan atau kenyamanan pengunjung lain serta dapat mengancam keselamatan jiwa, baik pendaki, pemandu, maupun orang di sekitar. Klasifikasi pelanggaran sedang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Pelanggaran Sedang

No	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi
1	Buang sampah dalam jumlah banyak	Ditinggalkan di campsite/ jalur	Teguran keras, peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan tour operator, sanksi blacklist 1-6 bulan
2	*Camp* di area terlarang	Di luar zona resmi, di dekat sumber air dan area rawan	Teguran keras, peringatan tertulis baik pendaki, pemandu, dan tour

			operator, blacklist 1- 6 bulan
3	Lintas jalur tanpa izin	Masuk/ keluar dari jalur tanpa izin	Teguran keras, peringatan tertulis baik pendaki, pemandu dan tour operator, blacklist 1-6 bulan
4	Menyalakan api unggun	Pelanggaran berisiko kebakaran	Teguran keras, peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan tour operator, blacklist 1 – 6 bulan
5	*Tour operator/ trekking organizer* tidak menyediakan pemandu sesuai dengan perbandingan pemandu yang ditetapkan oleh UPT	Berpotensi membahayakan keselamatan karena kurang optimalnya pengawasan	Teguran keras, peringatan tertulis, blacklist 1 - 6 bulan
6	Tidak mengambil kembali KTP di pos registrasi	Dianggap meninggalkan/ tidak membawa kembali sampah ke luar kawasan	Teguran keras, blacklist 1- 6 bulan

3. Pelanggaran berat

Mencakup Tindakan yang bersifat destruktif, membahayakan keselamatan, melanggar hukum, mengganggu/ merusak kelestarian lingkungan. Klasifikasi pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Pelanggaran Berat

No	Jenis Pelanggaran	Penjelasan	Sanki
1	Membawa NARKOTIKA	Pelanggaran hukum nasional	Pelaporan kepolisian, blacklist 2 tahun

2	Tindakan asusila/ kekerasan seksual	Termasuk pelecehan atau perbuatan cabul	Proses hukum dikeluarkan dari jalur, blacklist 2 tahun
3	Vandalisme	Merusak fasilitas atau alam (corat-coret merusak pohon/ batu)	Perbaikan fasilitas, blacklist 2 tahun
4	Membuka jalur baru tanpa izin	Merusak vegetasi dan ekosistem	Proses hukum dan blacklist permanen
5	Tour operator membawa pendaki tanpa izin	Mengabaikan sistem registrasi	Pencabutan izin operasional, blacklist 2 tahun
6	Memindahkan atau merusak fasilitas negara	Pelanggaran yang menyebabkan fungsi fasilitas yang disediakan tidak optimal dan membahayakan pengunjung	Peringatan tertulis, baik pendaki, pemandu dan tour operator, blacklist 6 bulan
7	Tour operator/ trekking organizer tidak menyediakan pemandu yang terdaftar dan bersertifikasi	Membahayakan keselematan tamu/ pedaki	Peringatan tertulis, baik pemandu dan operator dan blacklist 6 bulan

III. PENUTUP

Ketentuan yang belum/tidak tertuang di dalam SOP ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Balai TNKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pendakian di Kawasan TNKS.

Sungai Penuh, 17 Juli 2026

KEPALA BALAI BESAR,

HAIDIR, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730729 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN
PENDAKIAN GUNUNG KERINCI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama rombongan pendaki Gunung Kerinci

No. Pendaftaran/Tiket :
Nama/ Usia :
Alamat :
No hp :
Untuk keadaan darurat bisa menghubungi:
Nama :
Status kekeluargaan :
No hp :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi syarat Pendakian Gunung Kerinci antara lain:

1. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Gunung Kerinci sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci;
2. Melakukan pendakian Gunung Kerinci sampai dengan batas titik aman radius 3 km dari kawah aktif sesuai dengan rekomendasi dari laporan aktivitas yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Gunung Api;
3. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam kegiatan pendakian (di dalam kawasan) akan melakukan pertolongan mandiri oleh anggota tim dan melaporkan kepada petugas;
4. Saya dan anggota tim menggunakan kartu identitas (KTP/SIM) sebagai salah satu syarat pendakian atas nama masing-masing yang bersangkutan (tidak menggunakan/ memalsukan identitas orang lain);
5. tanggal masuk dan turun sesuai dengan tiket yang saya pegang dan akan mentaati hal tersebut;
6. Saya siap bertanggung jawab jika terjadi hal bahaya/bencana alam/hal tidak terduga lainnya dan tidak akan menuntut Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat untuk menanggung kerugian atas kejadian bahaya/bencana alam tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia dikenakan sanksi apabila pernyataan saya tidak benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat saya
A.n Rombongan

.....

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT
Jl. Basuki Rahmat No.11 Kotak Pos 40 Sungai Penuh 37101
Jambi TLP. 0748 22250 Fax 22300

FORMULIR PENDAKI
GUNUNG.....

No Tiket	:	
Nama Lengkap	:	
Alamat	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Tanggal Keluar	:	
Nama Guide/ Porter	:	
No Hp Guide	:	
Waktu Pendakian	:	

NAMA – NAMA ANGGOTA

No	Nama Lengkap	No Hp	No Hp Keluarga
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Dengan ini kami menyetujui dan menyatakan atas nama Perorangan serta kelompok atau rombongan bahwa akan mematuhi semua aturan SOP pendakian yang berlaku.

CATATAN LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN PENDAKIAN

GUNUNG.....

Nama :

Alamat :

No	An- Organik	Jumlah	Organik	Jumlah	Keterangan Checkot Sampah
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Dengan ini menyatajan bersedeia **MEMBAWA KEMBALI TURUN SAMPAH** dengan jumlah yang tertera di atas dan siap menerima **SANKI** administrasi dan denda apabila saya melanggarnya

Tempat dan tanggal :

Petugas Yang bertanda tangan

....

Sambungan Check Logistik

No	An- Organik	Jumlah	Organik	Jumlah	Keterangan Checkout Sampah